

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah organisasi didirikan dengan tujuan tertentu. Ada organisasi yang bertujuan untuk memperoleh laba secara maksimal, dan ada pula organisasi yang tidak berorientasi pada laba, yang biasa disebut organisasi nirlaba. Perusahaan merupakan salah satu bentuk organisasi bisnis yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Sebagian besar perusahaan, terutama sektor swasta, menjadikan laba sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan operasional. Harahap (2001) menyatakan bahwa perusahaan adalah unit usaha yang melakukan aktivitas ekonomi dengan tujuan memperoleh laba melalui kegiatan produksi dan distribusi barang atau jasa.

Perusahaan milik pemerintah tidak hanya mengejar laba, tetapi juga menjalankan fungsi pelayanan publik. Meski demikian, pencapaian laba tetap menjadi salah satu indikator efisiensi dan keberlanjutan usaha, karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya secara optimal. Laba dapat digunakan untuk menilai perkembangan perusahaan, efektivitas manajemen, serta prospek kelangsungan usaha di masa depan.

Laba yang diperoleh perusahaan tidak terlepas dari besarnya pendapatan yang dihasilkan. Pendapatan memegang peran penting karena menjadi sumber utama terbentuknya laba, sehingga pengelolaan pendapatan yang efektif akan berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan. Untuk memahami perannya lebih lanjut, Sugiono (2009) mendefinisikan pendapatan sebagai penambahan terhadap modal sebagai hasil operasi perusahaan yang timbul dari aktivitas normal perusahaan.

Selain definisi menurut para ahli, pendapatan juga diatur secara resmi dalam standar akuntansi. PSAK No. 72 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode, yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Standar ini menggantikan PSAK sebelumnya yang mengatur pendapatan, dan memberikan pedoman pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan secara lebih komprehensif.

Pendapatan tidak hanya mencerminkan hasil dari kegiatan utama perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Kieso et al. (2012) menyatakan bahwa pendapatan merupakan elemen penting dalam laporan laba rugi yang mencerminkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan penghasilan melalui aktivitas

operasional, seperti penjualan, pemberian jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

Oleh karena itu, pencatatan dan pelaporan pendapatan harus dilakukan secara akurat, sistematis, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan oleh para pengguna laporan, seperti manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Salah satu standar penting yang mengatur pengakuan dan pengukuran pendapatan di Indonesia adalah PSAK No. 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. PSAK ini mengadopsi IFRS 15 dan bertujuan untuk memberikan pendekatan tunggal dan komprehensif dalam pengakuan pendapatan yang menggantikan beberapa standar sebelumnya (seperti PSAK 23 dan PSAK 34).

PSAK 72 menekankan lima langkah pengakuan pendapatan, yaitu: mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi, dan mengakui pendapatan saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Penerapan PSAK ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan dicatat secara tepat waktu, tidak menyesatkan, dan mencerminkan substansi ekonomi transaksi.

Salah satu entitas yang relevan untuk dikaji terkait penerapan pengakuan dan pelaporan pendapatan adalah PT PLN (Persero), karena merupakan BUMN strategis yang memegang peran vital dalam penyediaan energi listrik di Indonesia, termasuk di wilayah Padang. Sebagai penyedia layanan publik yang beroperasi secara komersial, PLN dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. PSAK No. 72 Tahun 2017 wajib diterapkan oleh PLN karena pendapatan yang dihasilkannya sebagian besar berasal dari kontrak dengan pelanggan, yaitu penjualan tenaga listrik, yang secara langsung diatur dalam standar tersebut. Selain itu, PLN juga memperoleh pendapatan dari sumber non-operasional seperti sewa dan insentif, yang pengakuannya harus dilakukan sesuai ketentuan PSAK 72 agar penyajian laporan keuangan dapat diandalkan dan memenuhi prinsip akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi PSAK 72 dalam proses pencatatan dan pelaporan pendapatan pada PT PLN (PERSERO) UP3 PADANG ?

2. Apakah proses pencatatan dan pelaporan pendapatan pada PT PLN (PERSERO) UP3 PADANG sudah berdasarkan PSAK No. 72?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memnuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, dengan mengambil objek penelitian di PT PLN (Persero) UP3 Padang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana implelementasi dalam proses pencatatan dan pelaporan pendapatan berdasarkan PSAK No. 72 di PT PLN (Persero) UP3 Padang Manfaat Kegiatan Penelitian
2. Untuk mengetahui apakah proses pencatatan dan pelaporan pendapatan pada PT PLN (Persero) UP3 Padang sudah sesuai dengan PSAK No. 72

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan ini, diharapkan dapat memberikan memberikan manfaat sebagai berikut :

A. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis terkait implementasi proses pencatatan dan pelaporan pendapatan berdasarkan PSAK No. 72, khususnya di sektor ketenagalistrikan. Selain itu, penelitian ini menjadi pengalaman praktis dalam menerapkan teori akuntansi ke dalam studi kasus nyata pada perusahaan.

B. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk menilai apakah proses pencatatan dan pelaporan pendapatan yang diterapkan saat ini telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 72. Temuan penelitian juga dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan prosedur, sehingga kualitas laporan keuangan semakin andal dan akurat.

C. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi mahasiswa atau peneliti yang tertarik untuk mengkaji implementasi PSAK No. 72 pada

perusahaan penyedia jasa publik, khususnya di bidang ketenagalistrikan.

Informasi yang dihasilkan dapat membantu dalam pengembangan penelitian serupa di masa mendatang.

D. Penelitian ini dapat memberikan gambaran umum mengenai penerapan PSAK No. 72 di BUMN sektor ketenagalistrikan, yang dapat dimanfaatkan oleh regulator, auditor, atau pihak berkepentingan lainnya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengawasan dan penilaian kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung oleh penulis selama melakukan kegiatan penelitian di PT PLN (Persero) UP3 Padang. Melalui observasi ini, penulis mengamati aktivitas pencatatan dan pelaporan pendapatan serta penerapan PSAK No. 72 dalam praktik akuntansi perusahaan.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai PT PLN (Persero) UP3 Padang. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai proses pencatatan dan pelaporan pendapatan.

3. Studi Kepustakaan

Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber teori yang mendukung penelitian, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu, serta standar akuntansi keuangan seperti PSAK No. 72 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan di PT PLN (Persero) UP3 Padang yang beralamat di Jl. S. Parman No.221, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selama 40 (Empat puluh) hari kerja dari bulan Januari sampai Maret 2025.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan mengenai **“Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan pada PT PLN (Persero) UP3 Padang”** terdiri dari V (lima) bab, dimana sistematika penulisannya terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang yang terdiri dari manfaat bagi penulis, manfaat bagi perusahaan, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian terhadap Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan pada PT PLN (Persero) UP3 Padang. Konsep-konsep tersebut mengacu pada literatur yang valid baik buku teks/buku ajar/jurnal ilmiah.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab III menjelaskan tentang tempat magang. Pada bagian awal bab ini menjelaskan profil PT PLN (Persero) UP3 Padang dan kegiatan yang dilakukan perusahaan serta visi dan misi perusahaan. Pada bagian selanjutnya berisi tentang sejarah perusahaan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan mengenai pencatatan dan pelaporan pada PT PLN (Persero) Padang.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran-saran berdasar hasil pengamatan keseluruhan dari pelaksanaan yang telah dilakukan sebagai bahan masukan.

